

8 RENCANA AKSI

PERCEPATAN REFORMASI INTEGRITAS PASAR MODAL INDONESIA

LIKUIDITAS

1) Kebijakan Baru *Free Float*

- Menaikkan batas minimum *free float* emiten/perusahaan tercatat menjadi 15% sesuai standar global.
- Dalam kebijakan baru *free float* tersebut berlaku untuk emiten yang akan melakukan IPO sedangkan bagi emiten eksisting akan diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian dengan wajar.

TATA KELOLA & ENFORCEMENT

4) Demutualisasi Bursa Efek

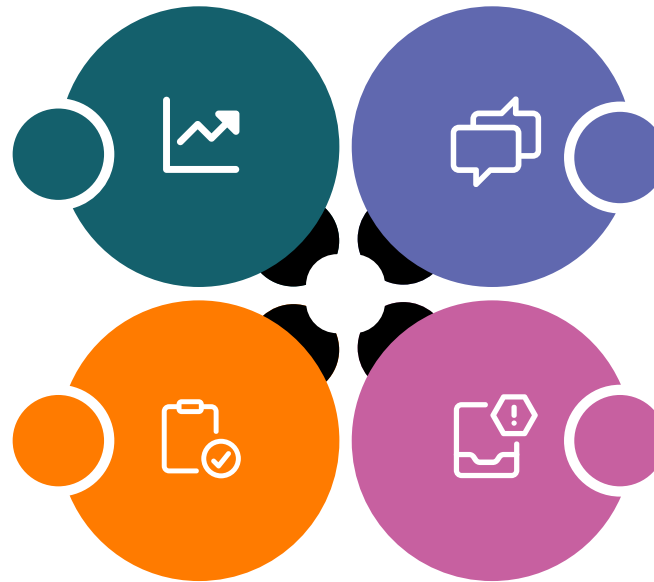
- Sebagai bagian dari penguatan governansi dan mitigasi benturan kepentingan.
- OJK terus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka persiapan implementasi Demutualisasi Bursa Efek.

5) Penegakan Peraturan dan *Sanksi*

Melanjutkan & memperkuat *enforcement* secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran hukum termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan

6) Tata Kelola Emiten

- Kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi/Komisaris/Komite Audit
- Kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik untuk memiliki sertifikasi CA (*Certified Accountant*).



TRANSPARANSI

2) Transparansi *Ultimate Beneficial Owner (UBO)*

- Memperkuat praktik transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham → meningkatkan kredibilitas dan *investability* pasar.
- Diiringi penguatan pengawasan dan *enforcement* terkait transparansi UBO dan afiliasi pemegang saham.

3) Penguatan Data Kepemilikan Saham

- Memerintahkan KSEI melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan *reliable*, a.L:
- Mendetailkan tipe investor dengan mengacu pada *best practices* global.
 - Penguatan ketentuan *disclosure* pemegang saham Emiten/Perusahaan Tercatat.

SINERGITAS

7) Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi

- Mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply, maupun infrastruktur
- Dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai *stakeholders* terkait.

8) Kolaborasi & Sinergi dengan *Stakeholders*

- Kolaborasi dan sinergi dengan *stakeholders* strategis (termasuk Pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak-pihak terkait) akan terus dipererat dalam melanjutkan reformasi struktural secara berkesinambungan.